

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Kelompok :

Nama Anggota :

Petunjuk Pengerjaan :

Silahkan berdiskusi bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini dengan menempelkan kertas jawaban pada kolom yang telah disediakan dengan benar.

Pilihlah jawaban masing-masing pertanyaan sudah disediakan, jadi silahkan untuk dapat mencermati dengan teliti .

Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi tinggi di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat !

Skor 20

Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan perekonomian pada masa awal kemerdekaan?

Skor 35

Analisislah dampak blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan !

Skor 50

Permasalahan ekonomi seperti apa yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat Demokrasi Parlementer?

Skor 35

Jelaskan tujuan dari kebijakan Gunting Syafruddin dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer!

Skor 50

Jelaskan tujuan dari Sistem Ekonomi Gerakan Benteng! Mengapa program ini mengalami kegagalan dalam mengubah struktur ekonomi Indonesia!

Skor 50

Apa dampak dari Nasionalisasi Perusahaan Asing terhadap ekonomi Indonesia selama masa Demokrasi Parlementer?

Skor 35

Sebutkan apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin!

Skor 20

Apa tujuan dari kebijakan devaluasi mata uang asing dan pembekuan simpanan pada masa Demokrasi Terpimpin?

Skor 35

Apa tujuan dari kebijakan deklarasi ekonomi (Dekon) yang dibuat pada masa Demokrasi Terpimpin?

Skor 35



SEMANGAT
BELAJAR

PILIHAN JAWABAN

Kekacauan perekonomian pada masa Demokrasi Parlementer kemudian memunculkan beberapa kebijakan salah satunya yaitu kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada 20 Maret 1950 dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar atau inflasi dan mengatasi defisit anggaran dengan memotong nilai uang senilai 2,50 rupiah ke atas menjadi setengah dari nilai uang tersebut. Hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang mengalami penyusutan peredaran uang yang signifikan, harga-harga barang pokok menjadi lebih stabil, tetapi kebijakan ini tidak cukup mengatasi kekacauan emosi yang terjadi secara jangka menengah.

Demokrasi Terpimpin merupakan masa dimana pemerintahan Indonesia berpusat pada presiden. Perkembangan ekonomi pada masa ini juga masih mengalami ketidakstabilan akibat penurunan ekspor dan invertase, inflasi yang tinggi, serta akibat dari adanya berbagai pemberontakan politik yang mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat beberapa langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ekonomi diantaranya yaitu dengan pembentukan dewan perancang nasional (Depernas), devaluasi mata uang, dan deklarasi ekonomi (Dekon).

Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer juga melakukan pencabutan hak milik Belanda atau negara asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan negara, serta mengurangi ketergantungan pada negara asing. Selain itu, adanya kebijakan ini juga mengubah struktur ekonomi yang banyak didominasi perusahaan asing dan etnis Tionghoa menuju struktur ekonomi yang lebih nasional.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah belum meresmikan mata uang resmi Indonesia, sehingga beredarnya mata uang asing secara tidak terkendali. Beredarnya mata uang Jepang di tengah masyarakat, kekosongan kas negara, pajak dan bea masuk yang sangat kecil menyebabkan tingginya inflasi pada masa ekonomi awal kemerdekaan yang tentunya berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat karena adanya kenaikan harga barang dan jasa.

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemulihan ekonomi. Adanya inflasi dan blokade ekonomi yang dilakukan Belanda membuat pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk memulihkan ekonomi. Langkah tersebut diantaranya melakukan program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman, melakukan diplomasi ke India, dan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan barang impor.

Kekacauan perekonomian pada masa Demokrasi Liberal juga memunculkan adanya program untuk melindungi dan memajukan pengusaha pribumi. Program ini merupakan usaha pemerintah Indonesia dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kegagalan program ini dikarenakan pengusaha pribumi cenderung menggunakan modal dari kredit pemerintah untuk kebutuhan pribadi dan tidak untuk mengembangkan usaha, serta karena adanya regulasi yang tidak efektif dan kurangnya dukungan sosial yang memadai.

Penutupan akses ekspor dan impor yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia menyebabkan produk buatan Indonesia tidak dapat dikirim keluar negeri dan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri tidak dapat terpenuhi. Akibat terhambatnya perdagangan dengan negara lain, Indonesia menjadi sangat bergantung pada sektor pertanian untuk pendapatan nasional. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia mencoba melakukan diplomasi dan hubungan dagang langsung dengan negara lain seperti India untuk mengurangi dampak negatif yang dilakukan oleh Belanda.

Mulai tahun 1950, Indonesia memasuki masa Demokrasi Parlementer yang juga dihadapkan dengan situasi perekonomian yang masih belum stabil dan penuh kekacauan. Pada saat itu, terjadi pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah menjadi permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah. Selain itu, adanya jumlah uang yang beredar tinggi menyebabkan inflasi dan meningkatnya biaya hidup juga menjadi permasalahan jangka pendek pada masa Demokrasi Parlementer.

Kebijakan yang dibuat untuk memperbaiki ekonomi Indonesia secara menyeluruh dengan menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi.

Kebijakan menurunkan mata uang rupiah Rp. 1.000 dan Rp. 500 menjadi Rp. 100 dan Rp. 50, serta melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp. 25.000 memiliki tujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar di masyarakat yang diharapkan dapat menekan inflasi dan memperbaiki keuangan negara.